

- &nbsp; Tanggal Upload program kinerja Target Kinerja Mulai Tanggal 28-09-2020 Sampai dengan 05-10-2020
- &nbsp; Tanggal Upload program kinerja Target Kinerja Mulai Tanggal 28-09-2021 Sampai dengan 05-10-2021

## MATRIK MONITORING KINERJA versi FORMAT 8 KOLOM (F8K)

### Monitoring Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian	Status Capaian			Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
								M	K	H	
1	Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisasian, pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengharmonisasian, pemantapan konsepsi pada rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan		periode T21-B03 Terlaksananya kegiatan koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemda Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota	100				LAPORAN TARJA PENINGKATAN PERAN PERANCANG.pdf
						periode T21-B06 Terharmonisasinya rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang- undangan Kantor Wilayah					Tarja B06 Pengharmonisasian, Surat Selesai Harmonisasi, Raperda.pdf
						periode T21-B09 Terharmonisasinya rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah oleh Perancang Peraturan Perundangundangan Kantor Wilayah	100				8.Laporan Tarja B-09 Perancang..pdf
						periode T21-B09					8.2.Action Plant Dakung Perancang Perancang B09.pdf
						periode T21-B12 Menyusun laporan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi pada rancangan peraturan daerah prakarsa Pemerintah Daerah dan disampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan					
2	Menciptakan kondisi / iklim usaha yang ramah Investasi dan responsif terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme oleh korporasi		1. Terciptanya pemahaman pelaku usaha / korporasi terkait kewajiban pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di wilayah	Meningkatnya jumlah pelapor Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) di wilayah		periode T21-B03 Koordinasi awal untuk pemetaan data Pemilik Manfaat di wilayah	100				1. Laporan Koordinasi awal BO.pdf
						periode T21-B03					2. Matrik data pelaporan pemilik manfaat di wilayah.pdf
						periode T21-B03	100				Undangan Rapat Bidang 040121.pdf
						periode T21-B03					1. Revisi Laporan koordinasi awal BO.pdf
						periode T21-B03	100				2. Revisi Matrik data pelaporan Pemilik Manfaat di wilayah.pdf
						periode T21-B06 Diseminasi kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat kepada korporasi di Wilayah Periode I					Laporan diseminasi periode I.pdf
						periode T21-B09 Diseminasi kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat kepada korporasi di Wilayah Periode II	100				Beneficial Owner.pdf
						periode T21-B09					Rapat Persiapan Tarja B09 2021.pdf
						periode T21-B12 Evaluasi atas pelaksanaan diseminasi kebijakan terkait pelaporan Pemilik Manfaat					
			2. Tercapainya pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Daerah terkait penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris di Wilayah	Meningkatnya pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah terkait penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah		periode T21-B03 Koordinasi awal untuk pemetaan pengawasan terkait penerapan PMPJ di wilayah	100				Laporan koordinasi awal PMPJ.pdf
						periode T21-B03					Undangan Rapat Bidang 040121.pdf
						periode T21-B03	100				Revisi Laporan koordinasi awal PMPJ.pdf
						periode T21-B03					Tambahan Lampiran Laporan Koordinasi awal PMPJ_Data Notaris Banten.pdf
						periode T21-B06 Pengawasan penerapan PMPJ oleh MPD kepada Notaris di Wilayah Periode I	100				Laporan hasil pengawasan periode I.pdf
						periode T21-B06					Tambahan_JADWAL PENGAWASAN PENERAPAN PMPJ.pdf
						periode T21-B06	100				Tambahan_penyampaian hasil kuesioner PPATK.pdf

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian	Status Capaian			Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
								M	K	H	
						periode T21-B09 Pengawasan penerapan PMPJ oleh MPD kepada Notaris di Wilayah Periode II	70				Surat Keterangan PMPJ.pdf
						periode T21-B12 Evaluasi atas pengawasan penerapan PMPJ oleh MPD kepada Notaris di Wilayah					
3	Menciptakan Kemudahan Berusaha bagi masyarakat tentang pendaftaran perseroan perorangan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di wilayah		Terciptanya pemahaman masyarakat di wilayah tentang pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK	Tercapainya implementasi layanan pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi Kriteria untuk UMK di wilayah		periode T21-B06 Koordinasi awal terkait peran kanwil dalam memperkenalkan kebijakan kemudahan berusaha di wilayah berdasarkan PP mengenai Perseroan yang memenuhi kriteria Untuk UMK	100				Laporan koordinasi awal.pdf
						periode T21-B09 Pelaksanaan webinar mengenai layanan pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK					Perseroan Perorangan.pdf
						periode T21-B09	100				Rapat Persiapan Tarja B09 2021.pdf
						periode T21-B12 Evaluasi atas pelaksanaan webinar mengenai layanan pendaftaran Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK					
4	Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual (KI) untuk meningkatkan permohonan KI daerah		Optimalisasi Kerjasama Kanwil untuk meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual Daerah	1. Terlaksananya Implementasi Kerjasama Kanwil untuk meningkatkan permohonan Kekayaan Intelektual Daerah		periode T21-B03 Persiapan Pelaksanaan Implementasi Kerjasama Kanwil untuk meningkatkan permohonan KI daerah	100				1. B03 KI Banten-Persiapan Pelaksanaan Implementasi Kerja Sama.pdf
						periode T21-B06 Kegiatan Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual dengan Perguruan Tinggi atau Pemerintah Daerah KI daerah					B06 2021-Implementasi Kerja Sama.pdf
						periode T21-B09 Kegiatan Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual dengan Perguruan Tinggi atau Pemerintah Daerah Paten dan KI daerah	100				B09 2021-Laporan Implementasi Kerja Sama.pdf
						periode T21-B12 Rencana Implementasi Kerjasama Kekayaan Intelektual Kanwil dengan Perguruan Tinggi/Pemda dan Stakeholder Lainnya untuk tahun 2022					
				2. Terlaksananya Implementasi Kerjasama KI untuk meningkatkan Permohonan Pendaftaran IG dan Desain Industri		periode T21-B03 Koordinasi dengan Pusat untuk Menyusun Permohonan IG	100				2. B03 KI Banten-Koordinasi Pusat Menyusun IG dan DI.pdf
						periode T21-B06 Koordinasi dengan Pemda dan atau MPIG untuk Menyusun Permohonan IG					B06 2021-Laporan Koordinasi IG.pdf
						periode T21-B09 Penyusunan Draft Permohonan IG	100				B09 2021-Laporan Penyusunan IG dan DI.pdf
						periode T21-B12 Permohonan IG dan Desain Industri					
5	Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) di Wilayah		Optimalisasi Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Terlaksananya Penegakan perlindungan Kekayaan Intelektual di Wilayah		periode T21-B03 Koordinasi dengan APH untuk pelaksanaan pencegahan pelanggaran KI	100				B03 KI Banten-Koordinasi APH.pdf
						periode T21-B06 Pelaksanaan pencegahan pelanggaran KI dengan APH sesuai dengan target stakeholder pada Perjanjian Kinerja					B06 2021-Laporan Pencegahan Pelanggaran KI.pdf
						periode T21-B09	100				B09 2021-Laporan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI.pdf
						periode T21-B12 Rencana Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran KI tahun 2022					
6	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden		Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah Presiden	Pemerintah Daerah telah melaporkan Aksi Hak Asasi Manusia		periode T21-B03 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM 2020 Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	100				1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM 2020.pdf
						periode T21-B03					2. Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.pdf
						periode T21-B06 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B04 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	100				1. Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM.pdf
						periode T21-B06					2. Surat Notifikasi, dan Laporan pemantauan.pdf

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian	Status Capaian			Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
								M	K	H	
						periode T21-B09 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B08 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota	100				Laporan Evaluasi pelaksanaan Aksi HAM B08 tahun 2021.pdf
						periode T21-B09					Surat notifikasi, dan laporan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, KabKota.pdf
						periode T21-B12 1. Evaluasi capaian pelaksanaan pelaporan Aksi HAM B12 Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota 2. Notifikasi dan pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM Daerah Provinsi, Kab/Kota					
7	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM		Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat kriteria Peduli HAM		periode T21-B03 Pemetaan Kabupaten Kota Peduli HAM (Yang Telah Melaksanakan, Yang Belum Pernah Mendapatkan Predikat dan Yang Belum Pernah Mengusulkan sama sekali)	100				Laporan hasil pemetaan Kabupaten Kota Peduli HAM.pdf
						periode T21-B06 1. Notifikasi bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota tentang pelaporan indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Pemeriksaan data indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 3. Menginput data yang sudah diperiksa kanwil ke aplikasi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM					Surat notifikasi.pdf
						periode T21-B06	100				Surat Keterangan BA Pemeriksaan.pdf
						periode T21-B09 1. Pemeriksaan data indikator kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM 2. Menginput data yang sudah diperiksa kanwil ke aplikasi kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM					TARJA B09 BID HAM Mendorong Terwujudnya Kabupaten Kota Peduli HAM.pdf
						periode T21-B09	100				Revisi Tarja B09 KKP HAM.pdf
						periode T21-B12 1. Notifikasi hasil penilaian kriteria kabupaten kota Peduli HAM 2. Evaluasi pelaporan kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM					
8	Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang terkait Undang- Undang Cipta Kerja		Tersusunnya rekomendasi terhadap status produk hukum daerah yang terkait dengan Undang- Undang Cipta Kerja baik perubahan, penggantian, pencabutan dan/atau pengintegrasian/ simplifikasi berdasarkan hasil Analisis dan Evaluasi Hukum dalam rangka pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan	Tersusunnya laporan hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan		periode T21-B03 Mengikuti bimbingan teknis analisis dan evaluasi produk hukum daerah melalui daring yang diselenggarakan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	100				LAPORAN TARJA AE.pdf
						periode T21-B03					Daftar Hadir Virtual Bimtek AE 11 Feb 2021 (MINGGU).pdf
						periode T21-B06 1. Tersusunnya hasil inventarisasi produk hukum daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi 2. Pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan (BPHN)	100				Tarja B06 AEH Gabungan.pdf
						periode T21-B09 1. Tersusunnya hasil inventarisasi produk hukum daerah yang menjadi objek analisis dan evaluasi 2. Pelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang- Undangan (BPHN)					Tarja B09 AEH 2021.pdf
						periode T21-B09	100				15.2.Action Plan Tarja Analisi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah terkait UUCK.pdf
						periode T21-B09					Revisi Tarja B09 AEH 2021.pdf
						periode T21-B12 Penyusunan rekomendasi dan penyampaian laporan kepada BPHN					
9	Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum		Terpenuhinya Pelaksana Bantuan Hukum (Paralegal) secara Kuantitas dan kualitas	Meningkatnya Jumlah Pelaksana Bantuan Hukum (Paralegal) yang didaftarkan oleh calon Pemberi Bantuan Hukum		periode T21-B03 Diseminasi Penjaringan dan Pengidentifikasian Calon Pemberi Bantuan Hukum, serta Penunjukkan Pokja Daerah	100				Laporan Kegiatan Desiminasi.pdf
						periode T21-B03					2. SK TIM POKJA.pdf
						periode T21-B03	100				nota dinas rapat internal.pdf
						periode T21-B03					1. Revisi Laporan Kegiatan Desiminasi.pdf
						periode T21-B06 Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH Baru)	100				Rekomendasi Akreditasi PBH Baru.pdf

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian	Status Capaian			Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
								M	K	H	
						periode T21-B09 Pelaksanaan Verifikasi dan Akreditasi (PBH lama)					Rekomendasi Akreditasi PBH Lama.pdf
10	Mewujudkan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas: Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK- IKM) serta Indeks Integritas Organisasi		Rekomendasi hasil kajian/analisis data Survei Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK- IKM) serta Indeks Integritas Organisasi yang dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah	Termanfaatkannya rekomendasi hasil kajian/analisis data sebagai bahan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah		periode T21-B03 1. Tersusunnya SK Tim Kajian/Analisis Kebijakan 2. Tersusunnya proposal Kajian/Analisis Kebijakan 3. Terlaksananya presentasi proposal 4. Pengolahan data dan evaluasi hasil Survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3A	100				1. SK TIM MONITORING DAN EVALUASI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DATA DAN IPK DAN IKM.pdf
						periode T21-B03					2. Proposal Kajian Analisis Kebijakan.pdf
						periode T21-B03	100				3. Bahan Presentasi.pdf
						periode T21-B03					4. Data hasil Survei.pdf
						periode T21-B06 1. Update pengolahan data dan evaluasi hasil Survei online Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (survei IPK-IKM) serta Indeks Integritas Organisasi berdasarkan aplikasi 3A 2. Pelaksanaan verifikasi ke lapangan 3. Pengolahan dan analisa data rekomendasi verifikasi lapangan	100				1. DATA HASIL SURVEI IPK IKM INTEGRITAS.pdf
						periode T21-B06					2. HASIL VERIFIKASI LAPANGAN EVALUASI HASIL SURVEI.pdf
						periode T21-B06	100				3. DRAFT LAPORAN AKHIR HASIL VERIFIKASI.pdf
						periode T21-B06					1. Revisi tambahan DATA HASIL SURVEI IPK IKM INTEGRITAS.pdf
						periode T21-B06	100				1. a. revisi LAP MONIT SURVEI IKM IPK Triw I 2021.pdf
						periode T21-B06					1. b. revisi LAP DATA LAPANGAN EVALUASI HASIL SURVEI.pdf
						periode T21-B06	100				1. c. revisi LAP EVALUASI HASIL SURVEI.pdf
						periode T21-B06					1.d. a. revisi BAHAN PRESENTASI DRAFT LAPORAN.pdf
						periode T21-B06	100				1.d. b. revisi SURAT UNDANGAN TIM.pdf
						periode T21-B06					1.d. c. revisi Surat Permohonan Narasumber.pdf
						periode T21-B06	100				1.d. d. revisi NOTULA RAPAT PRESENTASI DRAFT LAPORAN PK IKM.pdf
						periode T21-B06					1.d. e. revisi absensi draf laporan.pdf
						periode T21-B06	100				1.d. f. revisi CAPTURE BUKTI PENGIRIMAN LAPORAN.pdf
						periode T21-B06					1.d.g. revisi LAPORAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI.pdf
						periode T21-B06	100				1. e. revisi REKAP DATA HASIL SURVEI IPK IKM INTEGRITAS.pdf
						periode T21-B09 1. Presentasi draft laporan akhir dengan mengundang stakeholders. 2. Penyampaian laporan dan rekomendasi hasil kajian kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Kantor Wilayah 3. Perumusan Tindak lanjut Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Kajian					1. Kelengkapan dakung presentasi draft laporan akhir.pdf
						periode T21-B09	100				2. LAPORAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI.pdf
						periode T21-B09					3. CAPTURE BUKTI PENGIRIMAN LAPORAN.pdf
						periode T21-B09	100				4. RENCANA AKSI ATAU RENCANA RINDAKLANJUT PEMANFAATAN REKOMENDASI KEBIJAKAN HASIL KAJIAN.pdf
						periode T21-B09					Laporan Evaluasi atas Implementasi Model Intervensi.pdf
						periode T21-B09	100				Pembaharuan REKAP DATA TRIW III HSL SURVEI IPK IKM INTEGRITAS.pdf
						periode T21-B12 Evaluasi atas Implementasi Rencana Aksi/Rencana Tindaklanjutan Pemanfaatan Rekomendasi Kebijakan					
11	Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah		Termanfaatkannya data SIPKUMHAM dalam menyusun kebijakan di wilayah	Analisis kebijakan dengan memanfaatkan data SIPKUMHAM		periode T21-B03 1. Terbitnya SK Tim Analisis kebijakan dengan pemanfaatan SIPKUMHAM 2. Tersusunnya analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 3. Menginput laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM	100				1. SK TIM ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN PEMANFAATAN DATA SIPKUMHAM.pdf

No	Sasaran Strategis	Penanggung Jawab	Kriteria Keberhasilan (Indikator Kinerja)	Ukuran Keberhasilan (Target Kinerja)	Formulasi Perhitungan	Target Capaian	% Capaian	Status Capaian			Data Dukung Yang Harus Dilampirkan
								M	K	H	
						periode T21-B03					2. LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN PEMANFAATAN SIPKUMHAM.pdf
						periode T21-B03	100				3. CAPTURE INPUT LAPORAN PADA APLIKASI SIPKUMHAM.pdf
						periode T21-B03					2. REVISI TARJA LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN DENGAN PEMANFAATAN SIPKUMHAM.pdf
						periode T21-B03	100				3. REVISI CAPTURE INPUT LAPORAN PADA APLIKASI SIPKUMHAM.pdf
						periode T21-B06 1. Menginput laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 2. Tersusunnya analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM					DAMPAK KEKERASAN TERHADAP ANAK.pdf
						periode T21-B06	100				PENCEGAHAN GANGGUAN KANTIB DI LAPAS DAN RUTAN 2021.pdf
						periode T21-B06					2. CAPTURE input laporan aplikasi sipkumham.pdf
						periode T21-B06	100				1. Revisi tambahan Laporan Analisis Kebijakan_1.pdf
						periode T21-B06					1. Revisi tambahan Laporan Analisis Kebijakan_2.pdf
						periode T21-B06	100				2. Revisi tambahan CAPTURE input laporan aplikasi sipkumham.pdf
						periode T21-B06					2.a. 1. revisi SIPKUMHAM APRIL 2021.pdf
						periode T21-B06	100				2.a. 2. revisi SIPKUMHAM MEI 2021.pdf
						periode T21-B06					2.a. 3. revisi SIPKUMHAM JUNI 2021.pdf
						periode T21-B06	100				2.b. 1.revisi RAPAT SIPKUMHAM APRIL160621 (1).pdf
						periode T21-B06					2.b. 2. revisi RAPAT SIPKUMHAM MEI 230621.pdf
						periode T21-B06	100				2.b. 3. revisi RAPAT SIPKUMHAM JUNI 240621.pdf
						periode T21-B06					2.c. 1. revisi CAPTURE input laporan aplikasi sipkumham.pdf
						periode T21-B06	100				2.c. 2. revisi CAPTURE BUKTI PENYAMPAIAN KE KAKANWIL.pdf
						periode T21-B09 1. Tersusunnya analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. Menginput laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM					Laporan Analisis Kebijakan Bulan Juli, Agustus, dan September.pdf
						periode T21-B09	100				Capture Input Laporan.pdf
						periode T21-B09					Undangan, notula, daftar hadir, dan foto dokumentasi presentasi.pdf
						periode T21-B12 1. Tersusunnya analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM 2. Menginput laporan analisis kebijakan pada aplikasi SIPKUMHAM 3. Evaluasi pelaksanaan analisis kebijakan dengan pemanfaatan data SIPKUMHAM					